



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI;
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;
BADAN PENCAIRAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2015 – 2016
Masa Sidang : III
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : **Rapat Kerja**
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Februari 2016
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.30 WIB s.d 11.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI
Gedung Nusantara.
Acara : 1. Pengantar Musyawarah dalam rangka pembahasan atas RUU tentang Jasa Konstruksi yang terdiri dari:
a. Penjelasan DPR RI atas RUU tentang Jasa Konstruksi
b. Pandangan Presiden atas RUU tentang Jasa Konstruksi
2. Penetapan Jadwal dan Mekanisme pembahasan RUU tentang Jasa Konstruksi.
Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Pemerintah : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Tenaga Kerja atau yang mewakili, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi V DPR RI dibuka pada pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini adalah Pengantar Musyawarah dalam rangka pembahasan atas RUU tentang Jasa Konstruksi dan penetapan Jadwal dan Mekanisme pembahasan RUU tentang Jasa Konstruksi.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pimpinan Komisi V DPR RI untuk menyampaikan Penjelasan DPR RI atas RUU tentang Jasa Konstruksi.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan pandangan Presiden terhadap RUU tentang Jasa Konstruksi.
5. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada anggota Komisi V DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap jadwal dan mekanisme pembahasan RUU tentang Jasa Konstruksi.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI dan Pemerintah menyetujui mekanisme dan jadwal pembahasan atas RUU tentang Jasa Konstruksi (sebagaimana terlampir).
2. Komisi V DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa DIM RUU tentang Jasa Konstruksi segera disusun oleh Pemerintah dan disampaikan kepada Komisi V DPR RI sebelum rapat kerja tanggal 3 Maret 2016.
3. Komisi V DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa untuk mengefektifkan proses pembahasan selanjutnya atas RUU tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah akan melengkapi dan mengikutsertakan pejabat dari Kementerian/Lembaga lainnya (selain yang telah ditugaskan dalam Surat Presiden Nomor: R-73/Pres/12/2015) diantaranya dari: Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi; Kementerian Perhubungan; Kementerian ESDM; Sekretariat Negara; Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Ahli bahasa dari Pusat Bahasa.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.15 WIB.

Jakarta, 24 Februari 2016

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

TTD

M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,

TTD

FARY DJEMY FRANCIS